

SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN**

ANNISA ISLAMİYAH NUR

105730435113



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

ANNISA ISLAMIYAH NUR

105730435113

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Nama Mahasiswa : ANNISA ISLAMIYAH NUR

No. Stambuk : 105730 4351 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Dosen Penguji skripsi Strata Satu (S1) pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN : 0916096601

Pembimbing II

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM : 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama ANNISA ISLAMİYAH NUR, NIM 105730435113 ini telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan tim penguji pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Muharram 1439

14 Oktober 2017

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)

(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda (.....)

(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi)

4. Penguji : 1. Dr.Hj. Ruliaty, MM (.....)

2. Muchriana Muchran, SE,M.Si.Ak.CA (.....)

3. Linda Arisanty Razak SE,M.Si.Ak.CA (.....)

4. Asriati, SE.,M.Si (.....)

ABSTRAK

ANNISA ISLAMIYAH NUR, stambuk**105730435113,**
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan,
dibimbing oleh Moh. Aris Pasigaidan Muh. Nur Rasyid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Metode teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi linear berganda dan pengelolaan data primer menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions)

Pengaruh variable dari pengawasan keuangan daerah (X_1), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis uji F bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($698,863 > 3,35$) besarnya pengaruh dapat dilihat dari R square yaitu 98,1% yang menunjukkan bahwa pengaruh variable tersebut terhadap variable terikat sehingga 1,9% di pengaruhi oleh variable lain selain penelitian ini. Hasil menggunakan uji t menunjukkan bahwa variable pengawasan keuangan daerah (X_1), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh nyata terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan, variable yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan adalah variable Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) karena mempunyai koefisien tertinggi: 5,379

Kata kunci : Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan,.

MOTTO

Sesuatu akan menjadi kebanggan jika sesuatu itu dikerjakan

dan bukan hanya dipikirkan.....

Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan

Bekerja untuk mencapainya.....

“Jadikanlah Sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah

beserta orang – orang yang sabar”

(Q.S AL – BAQARAH : 153)

Kupersembahkan karya ini untuk Ayahanda Gazali Abd Rachman, SH dan Ibunda

Kasmawaty beserta orang – orang terdekatku semoga mereka berada

Dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan hidayah-Nya, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa itizam diatas jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan atas segala apresiasi yang telah disumbangkan kepada penulis serta ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abd.Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan izin mengadakan penelitian.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H.Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.CA dan Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga skripsi ini bias terselesaikan.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan penilaian yang baik, sehingga kami berhak memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan semua staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses pendidikan.
7. Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa beserta staff yang tulus membantu bekerjasama dengan baik selama proses penelitian berlangsung guna penyelesaian skripsi ini.
8. Yang terhormat dan tercinta orang tuaku, Ayahanda Gazali Abd Rachman, SH dan Ibunda Kasmawaty, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan pengertiannya yang disertai dengan do'a dalam mengasuh, mendidik, dan membimbingku sejak kecil hingga sekarang ini.
9. Saudara – saudaraku yang tercinta dan tersayang, Muh.Ali Mabhan, Yustisi Satriani, Abidah Ardelia dan Uwais Raja Rawallangi, atas kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan.
10. Untuk orang terdekatku Darmawant dan sahabat – sahabatku yang saya sayangi dan saya banggakan, Andi Wawing Sriani, Nur Qodryati, dan Sartika yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan yang tiada hentinya hingga terselesainya skripsi ini.

11. Teman – teman AK - 7.13 dan angkatan 2013 yang turut membantu dalam memberikan motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Dibalik keterbatasan dan kesederhanaan ini penulis mempersembahkan skripsi untuk dunia pendidikan, semoga bermanfaat.

Makassar, 14 Oktober 2017

penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABLE | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. TujuanPenelitian | 9 |
| D. ManfaatPenelitian | 9 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. PengertianPengawasan..... | 11 |
| B. TujuanPengawasan..... | 13 |
| C. PengertianKeuangan Daerah | 13 |
| D. PengawasanKeuangan Daerah | 16 |
| E. PemanfaatanTeknologi..... | 20 |
| F. NilaiInformasi | 22 |
| G. LaporanKeuangan Daerah..... | 22 |
| H. TujuanLaporanKeuangan | 23 |

| | |
|---|-----------|
| I. Nilai Informasi Laporan Keuangan | 24 |
| J. Penelitian Terdahulu | 27 |
| K. Kerangka Pikir | 30 |
| L. Hipotesis..... | 31 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| B. Metode Pengumpulan Data | 23 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| D. Populasi dan Sampel | 34 |
| E. Definisi Operasional Variabel | 34 |
| F. Metode Analisis | 35 |
| BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | 35 |
| A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gowa | 39 |
| B. Visi dan Misi BPKD Gowa..... | 31 |
| BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Karakteristik Responden | 41 |
| B. Analisis Statistik Deskriptif | 46 |
| C. Analisis Hasil Penelitian | 47 |
| D. Hasil Pengujian Hipotesis | 54 |
| E. Interpretasi Hasil Penelitian | 59 |
| BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GBAR

| | Halaman |
|-----------------|----------------|
| Gambar 2.1..... | 30 |
| Gambar 5.1..... | 42 |
| Gambar 5.2..... | 43 |
| Gambar 5.3..... | 44 |
| Gambar 5.4..... | 45 |

DAFTAR TABLE

| | Halaman |
|------------------|----------------|
| Table 5.1 | 41 |
| Table 5.2 | 43 |
| Table 5.3 | 44 |
| Table 5.4 | 45 |
| Table 5.5 | 46 |
| Table 5.6 | 48 |
| Table 5.7 | 49 |
| Table 5.8 | 50 |
| Table 5.9 | 51 |
| Table 5.10 | 52 |
| Table 5.11 | 55 |
| Table 5.12 | 56 |
| Table 5.13 | 58 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyajian laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah yang besar, kemampuan multiprocessing, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia – sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi komunikasi antara lain berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi factor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap informasi laporan keuangan.

Pada tingkat pemerintah daerah reformasi pengelolaan keuangan ini terus berlanjut dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah, yang mengharuskan penyajian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Berlanjut lagi dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 58 tahun Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang didalamnya juga termasuk untuk pemerintahan daerah (Hafis,2013).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, asas umum tersebut sesuai dengan isi pasal 4 dari peraturan pemerintah (Abdul Hafis, 2013), yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan

keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten Gowa dinas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuaskial, 2007). Pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwarjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 antara lain:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dipercaya
- d. Dapat dipahami

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mendapatkan pengawasan keuangan daerah yang baik sehingga menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Kabupaten Gowa dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya. BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa dari tahun anggaran 2011 – 2015. Pemberian opini tersebut tidak lepas dari pengaruh pengawasan keuangan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap nilai informasi yang diharapkan. (Rakyatku News, 11 Februari 2017)

Menurut informasi yang didapatkan dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa sudah lima tahun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualia (WTP).

Prestasi yang dicapai pemerintah Kabupaten Gowa tidak lepas dari pengawasan yang baik dan pemanfaatan teknologi sehingga pemerintah mampu memberikan informasi laporan keuangan yang wajar sebagai hasil pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain dari prestasi yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Gowa masih terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Masalah yang pertama adalah pengamanan dan pemanfaatan

asset tetap pada Pemkab Gowa belum memadai, masalah yang kedua adalah penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran tidak tertib dan menimbulkan ketekoran hingga Rp. 1,9 miliar an masalah yang terakhir adalah penyelesaian utang Pemkab kepada BPD Sulselbar yang berlarut – larut dari tahun 2006, pembelian tiket perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan, dan pengadaan barang dan jasa di dinas pemuda dan olahraga yang belum sesuai dengan ketentuan. (Antara News.com, 11 Februari 2017).

Berdasarkan fenomena – fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah masih belum memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif, diantaranya keandalan. Peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan daerah.

Hal yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan laporan keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

daerah, maka pembinaan aparat pengawas intern harus dilakukan secara terus – menerus.

Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan teknologi informasi yang pernah dilakukan. Penelitian Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Zetra (2009) meneliti tentang kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. (portalgaruda.org, 11 Februari 2017)

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dari Armando (2013) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah .Namun terdapat perbedaan antara variabel independennya dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :

”Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan sumbangan data empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada dinas pengelolaan

keuangan daerah dalam bidang pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, control serta kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Menurut Urwick, Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah memerlukan pengawasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengawasan dilakukan untuk menghindari perilaku pejabat yang mengelola keuangan dari ketidakjujuran, penyelewengan, kebocoran anggaran, dan korupsi.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewajibannya dan ayat (2) menyebutkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut Sule dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan

tindakan yang dapat mendukung pencatatan hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD). Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*). Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bias membentuk badan ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. (Mardiasmo, Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah, 2002, 2004)

Menurut Iman dan Siswandi (2009:195), mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

B. Tujuan pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Siswandi (2009: 83 – 84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
3. Pencapaian tujuan dana sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada didalam organisasi
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari yang tepat

C. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (APBD). Peraturan pemerintah republik Indonesia (PP.RI) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai Negara atau lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Semua hak yaitu hak untuk memungut sumber – sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain – lain, dan atau hak untuk menerima sumber – sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah
2. Semua kewajiban yaitu kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayarkan tagihan – tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan

ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber – sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Menurut Mamesah (2007:27), tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu, tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat – menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat – surat penting atau mengarsipkan, dan kegiatan dokumentasi lainnya. Di lain pihak, tata usaha keuangan pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip, standarisasi, dan prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual dibidang keuangan.

D. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan (peraturan menteri dalam negeri nomor 51 tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah atau (APBD). Menurut undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah. Berdasarkan dari undang – undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan pasal 1 ayat 8 adalah suatu rencana keuangan tahunan anggaran daerah yang disetujui oleh DPRD. Pengawasan dilakukan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagai tolok ukur pengawasan keuangan daerah yang diatur dalam keputusan presiden nomor 74 tahun 2001 antara lain:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Yaitu proses pengawasan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana perundang – undangan agar terhindar dari praktek KKN.

2. Evaluasi kegiatan

Yaitu proses evaluasi kegiatan yang dilakukan secara bertahap dengan cara membandingkan antara kondisi sekarang dan kenyataan yang ada.

3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti

Yaitu proses kegiatan pengawasan pencatatan keuangan yang dilakukan setiap adanya transaksi dan bukti yang kuat sehingga terhindar dari kesalahan dalam pencatatan.

4. Pencatatan transaksi tepat waktu

Yaitu proses kegiatan transaksi yang dilakukan tepat waktu terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah dan diklasifikasikan dengan benar.

5. Dokumentasi bukti

Bukti yang telah digunakan dalam setiap pencatatan transaksi disimpan atau didokumentasikan dengan baik dan benar.

6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas

Yaitu adanya sistem dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

7. Laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP

Laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai SAP serta disusun tepat waktu.

Peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, dan juga dalam pasal 2 menjelaskan BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 BPKP menyelenggarakan fungsinya.

Dilingkungan BPKP dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas. Inspektorat sebagaimana dimaksudkan pasal 30 ayat (1) adalah unsur pengawas

intern BPKP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPKP, dan secara administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris utama dan inspektorat dipimpin oleh inspektur. Inspektorat juga dalam pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten/kota menjelaskan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan inspektorat provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota, selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan inspektorat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Setelah menjelaskan tentang ketentuan umum dan kedudukan inspektorat provinsi dan kabupaten/kota selanjutnya pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatakan bahwa inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah

kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Indikator variabel pengawasan keuangan daerah diambil dari peneliti Arfianti (2011) yang terdiri dari:

- a. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- b. Evaluasi kegiatan
- c. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti
- d. Pencatatan transaksi tepat waktu
- e. Dokumentasi bukti
- f. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
- g. Laporan SKPD sesuai standar akuntansi pemerintahan

E. Pemanfaatan teknologi

Menurut Wilkinson et al (2003) teknologi informasi meliputi computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya:

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010)

Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah (SIKD) menyebutkan dalam pasal 9 ayat (2) pemerintah menyelenggarakan SIKD dengan tujuan menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional dan diselenggarakan oleh menteri keuangan. Dan dalam pasal 10 ayat (2) salah satu fungsi penyelenggaraan SIKD untuk mengkoordinasikan jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SIKD didaerah diatur dalam pasal 11 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD didaerahnya masing – masing, dan tujuan penyelenggaraan SIKD didaerah untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Pasal 13 menyebutkan penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah dan paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).

Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi diambil dari peneliti yang dilakukan oleh Ariesta (2013) yang terdiri dari:

- a. Tersedianya computer dalam jumlah yang cukup
- b. Terpasangnya jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- c. Proses akuntansi secara komputerisasi
- d. Software sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- e. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
- f. Pemeliharaan peralatan
- g. Perbaikan peralatan yang rusak/using

F. Nilai Informasi

Suwardjono (2005) mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para yang memakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai (kebermanfaatan keputusan) apabila informasi tersebut:

1. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya dimasa lalu, sekarang atau masa akan datang.
2. Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya harapan dalam kondisi ketidakpastian.
3. Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai

G. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas lain.

Peraturan menteri keuangan nomor 171 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat menjelaskan dalam bagian pertama yaitu pedoman pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk umum dalam menyelenggarakan akuntansi bendahara Negara dan akuntansi dan mempunyai ruang lingkup sampai ke unit akuntansi pada pemerintah daerah. Didalam bagian kedua menjelaskan bagaimana sistem

akuntansi bendahara umum Negara yang terbagi atas dua subsistem yaitu sistem akuntansi bendahara umum Negara. Dan bagian yang ketiga dan keempat menjelaskan tentang sistem akuntansi keuangan dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Negara dan bagian yang kelima dalam PMK nomor 171 tahun 2007 adalah bentuk dan format laporan keuangan yang dimana itu terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran bahwa semua transaksi keuangan baik belanja maupun pendapatan yang mempengaruhi realisasi anggaran dan neraca sudah dibukukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

H. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*), laporan keuangan yang telah ditetapkan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospectivereporting*), laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitori kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah

ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization*), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana
4. Kelangsungan organisasi atau unit kerja dapat menruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang
5. Hubungan masyarakat (*public relation*), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengarhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak – pihak lain yang berkepentingan
6. Sumberr fakta dan gambaran (*source of facts and figures*), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui secara terlebih dalam.

I. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah pasal 1 ayat (16) mengatakan bahwa informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 mengatakan daerah menyampaika informasi

yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah dan pasal 3 mengatakan informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip – prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah dalam pasal 4 sebagaimana mencakup:

1. APBD, dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu
6. Laporan keuangan perusahaan daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal daerah

Penyampaian informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah paling lambat tanggal 31 januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai apabila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan

pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam rangka konseptual akuntansi pemerintah (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010) antara lain:

1. Relevan

Yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

2. Andal

Yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

J. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arfianti (2011) menemukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi criteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang meneliti pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, menyimpulkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tuaskial (2007) menyimpulkan secara parsial pengawasan eksternal serta pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh

terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun secara simultan pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Windyaningrum (2010), menemukan bukti empiris bahwa pada Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian Indiasari (2008) tentang pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh. Alat analisis adalah analisis faktor.

Penelitian Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota Padang. Kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemda. Alat analisis yaitu regresi berganda.

Penelitian Fikri (2011) tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota Padang. SIKD dan pengawasan keuangan

daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemda melalui SIKD. Alat analisis yaitu analisis jalur.

Penelitian Amrullah (2011) tentang pengaruh personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap perana auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara parsial, personal background tidak berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Muh. Taufiq Effendi (2010), tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo. Dari penelitian tersebut diketahui pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi aparat inspektorat kota Gorontalo terhadap kualitas audit.

Penelitian Ahmad (2011), tentang pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada inspektorat kabupaten pasaman. Hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan

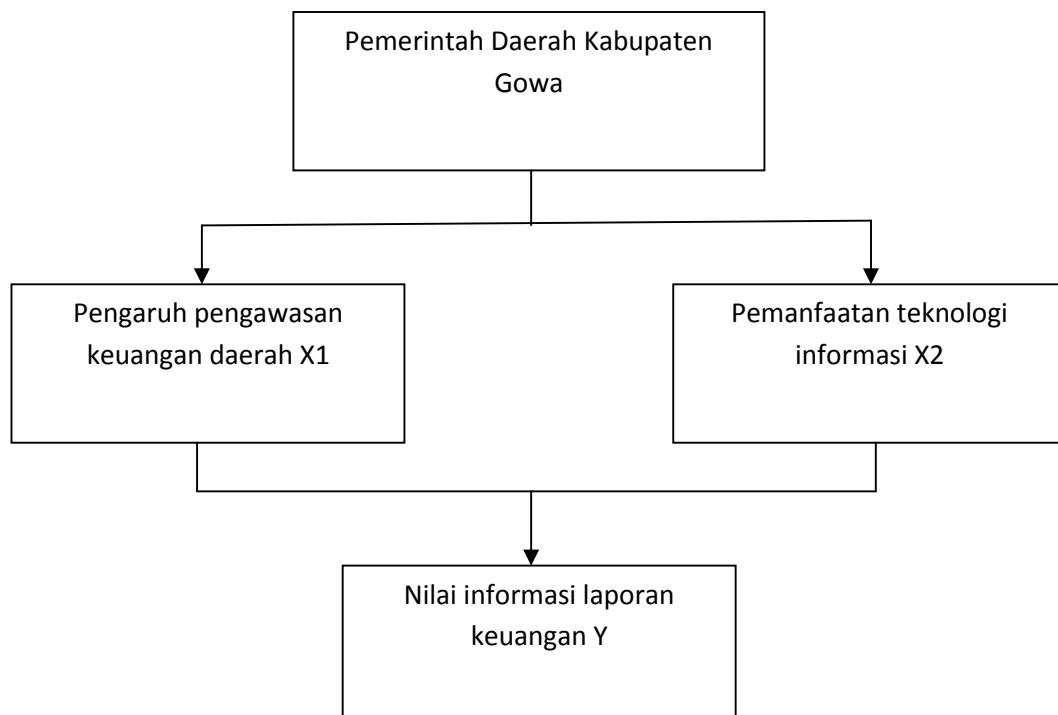
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat tinspektorat kabupaten pasaman.

K. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dimana yang menjadi variabel independen yakni pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang menjadi variabel dependen yakni nilai informasi laporan keuangan

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



L. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat diduga bahwa:

H₁: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gowa, dimana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa menjadi objek penelitian. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 bulan, dari bulan maret sampai april 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literature dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.
2. Penelitian lapang (*Field Research*) yaitu pengumpulan data lapang dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan.
 - b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat pernyataan-pernyataan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah awal dari proses analisis pada penelitian, dalam metode pengumpulan data sehubungan dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan jenis data yaitu:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:14), penelitian kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Data primer secara khusus diperoleh dari responden yang menjawab pertanyaan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah pejabat dan staff sub bagian keuangan / akuntansi badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa.

2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang dari badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa karena pegawai bagian keuangan/akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan karena setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah dan terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Pengawasan Keuangan Daerah (X1), proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah atau APBD sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), merupakan penggunaan secara optimal teknologi informasi dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

3. Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y), merupakan laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode – periode sebelumnya.

F. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif pada penelitian ini menyediakan tentang identitas responden.

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial merupakan analisis data dengan menggunakan alat statistic dan dilakukan untuk menguji hipotesis. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel yaitu Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan

= Konstan

b_1b_2 = Koefisien Regresi

X1 = Pengawasan Keuangan Daerah

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

E = Error

G. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian. Pada penelitian ini tepatnya pada analisis inferensial digunakan analisis regresi linear berganda yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel – variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:89) yakni pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan. Kriteria pengujian untuk F adalah:

- a) Jika $f_{hitung} < f_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
- b) Jika $f_{hitung} > f_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
- c) Pengujian Hipotesis
 $H_0 : b_i = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama terhadap nilai informasi laporan keuangan.

$H_a : b_i \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama terhadap nilai informasi laporan keuangan.

3. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini di uji menggunakan uji uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2013:88). Kriteria pengujian untuk uji t adalah:

- a) Jika $t_{hitung} < t_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
- b) Jika $t_{hitung} > t_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
- c) Pengujian hipotesis:

$H_0 : b_i = 0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

$H_a : b_i \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur. Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah

menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa, Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan di Malino, Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatonya berkedudukan di Limbung, Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatonya berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik

menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :

- a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.
- b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang.
- c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.
- d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung.
- e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
- f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
- g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
- h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingatkan, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun

1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa. Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan

daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

a. Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Gowa

1) Visi

Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan ahlak yang tinggi serta keterampilan yang tinggi.
- b) Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan ekonomi.
- c) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
- d) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintah yang baik.
- e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

B. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Gowa

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan

seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Misi Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Gowa, Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan ;
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada pada bagian keuangan atau akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Jumlah responden yaitu sebanyak 45 responden dan hanya 30 yang kembali. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

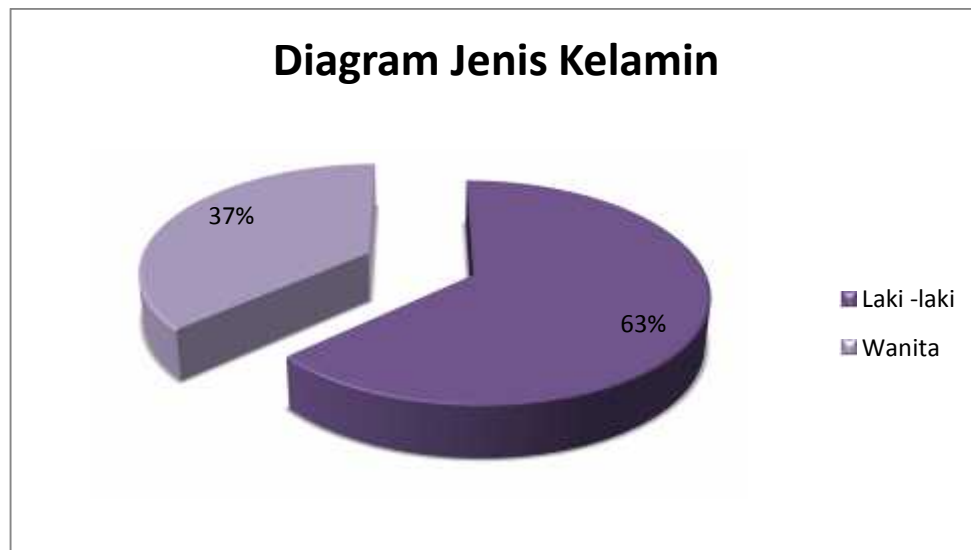
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini:

Table 5.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Laki -laki | 19 | 37% |
| Wanita | 11 | 63% |
| jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.1

Berdasarkan gambar 5.1, dari 30 jumlah responden 19 orang atau 37% berjenis kelamin laki – laki dan 11 orang atau 63% berjenis kelamin perempuan. Angka tersebut menunjuk bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki – laki.

2. Profil Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada table 5.2 berikut:

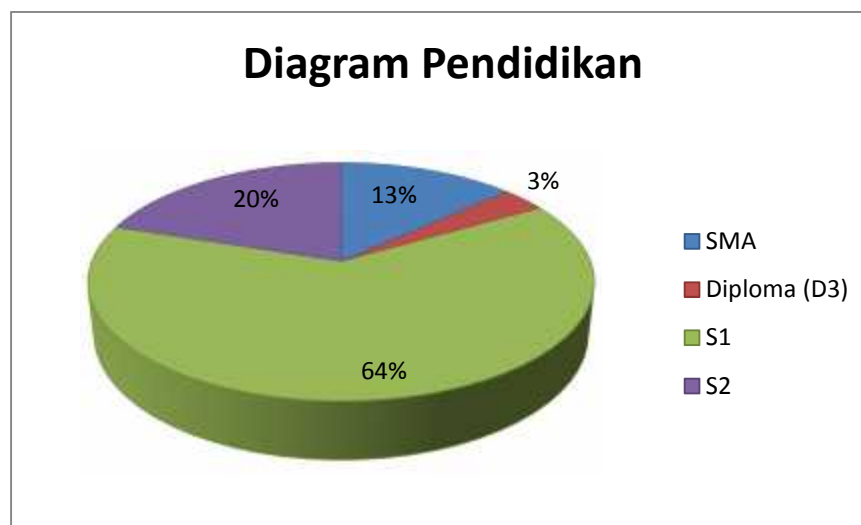
Table 5.2

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------------|------------------|----------------|
| SMA | 4 | 13% |
| Diploma (D3) | 1 | 3% |
| S1 | 19 | 64% |
| S2 | 6 | 20% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.2



Berdasarkan gambar 5.2, dari 30 jumlah responden 4 orang atau 13% berpendidikan SMA, 1 orang atau 3% berpendidikan D3, 19 orang atau 64% berpendidikan S1 dan 6 orang atau 20% berpendidikan S2. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responded berpendidikan S1.

3. Profil Responden berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada table 5.3 berikut ini:

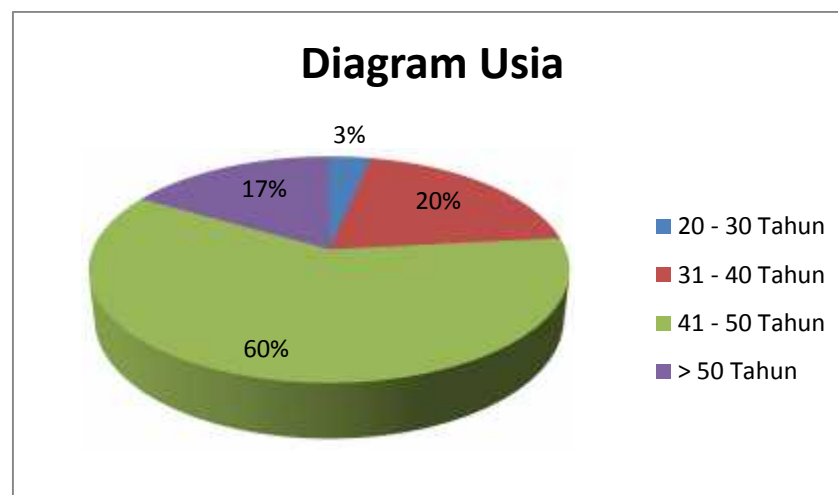
Table 5.3

Profil Berdasarkan Responden Berdasarkan Usia

| Usia | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------|------------------|----------------|
| 20 - 30 Tahun | 1 | 3% |
| 31 - 40 Tahun | 6 | 20% |
| 41 - 50 Tahun | 18 | 60% |
| > 50 Tahun | 5 | 17% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.3



Berdasarkan gambar 5.3, dari 30 jumlah responden 1 orang atau 3% berusia 20 – 30 tahun, 6 orang atau 20% berusia 31 – 40 tahun, 18 orang atau 60% berusia 41 – 50 tahun, dan 5 orang atau 17% berusia >50 tahun.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat dari table 5.4 berikut ini:

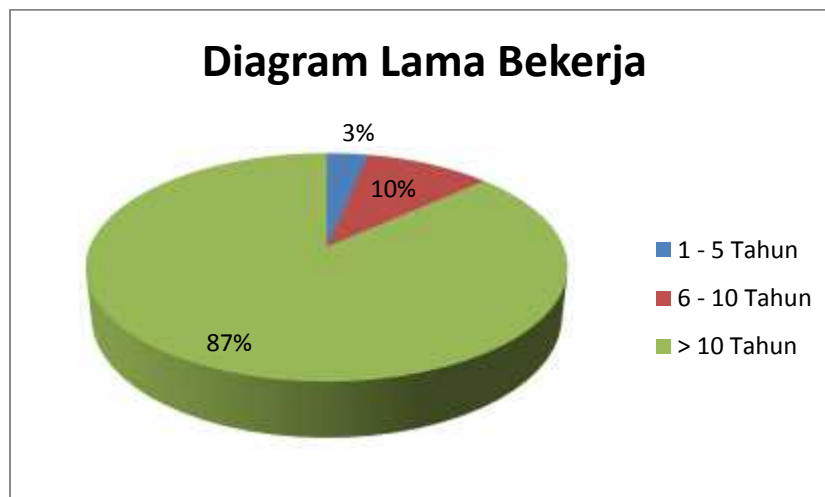
Table 5.4

Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

| Lama Bekerja | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - 5 Tahun | 1 | 3% |
| 6 - 10 Tahun | 3 | 10% |
| > 10 Tahun | 26 | 87% |
| Jumlah | 30 | 100% |

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2017

Gambar 5.4



Berdasarkan gambar 5.4, dari 30 jumlah responden sebanyak 1 orang atau 3% sudah bekerja selama 1 – 5 Tahun, 3 orang atau 10% sudah bekerja selama 6 – 10 tahun, dan sebanyak 26 orang atau 87% sudah bekerja >10 tahun.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran data variabel – variabel penelitian yaitu Pengawasan Keuangan Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) telah dilakukan dengan baik. Lihat pada table 5.5

Table 5.5
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | N | Range | Minimum | Maximum | Mean | | Std. Deviation |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Std. Error | Statistic |
| pengaruh pengawasan keuangan daerah | 30 | 7.00 | 28.00 | 35.00 | 31.2000 | .53261 | 2.91725 |
| pemanfaatan teknologi informasi | 30 | 7.00 | 28.00 | 35.00 | 30.3000 | .56761 | 3.10894 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------|-------|-------|---------|--------|---------|
| nilai informasi laporan keuangan | 30 | 9.00 | 36.00 | 45.00 | 39.2333 | .79174 | 4.33656 |
| Valid N (listwise) | 30 | | | | | | |

Sumber: *output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan table 5.5 diatas, bahwa nilai rata – rata (mean) variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1) 31,2000 lebih besar dari standar deviasi 2,91725. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data instrumen variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1) baik. Begitupun dengan nilai rata – rata (mean) variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 30,3000 lebih besar dari standar deviasin 3,10894 yang berarti data yang disebar baik. Dan juga nilai rata – rata mean variabel nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) 39,2333 lebih besar kecil dari 4,33656. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dikatakan baik karena rata – rata dari setiap instrumen lebih besar dari standar deviasinya kecuali pada instrumen Nilai informasi Laporan keuangan standar deviasinya lebih besar dari nilai rata –rata.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pada hasil tujuan penelitian yang telah dilakukan maka yang pertama akan di analisis ada tidaknya pengaruh secara signifikan baik secara menyeluruh atau serentak selain itu dilanjutkan lagi dengan analisis

untuk mengetahui variabel mana dari 2 variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel terikat.

1. Uji Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuisioner) melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas menggunakan rumus tehnik korelasi *product moment person*. Kemudian pengujian keberartian koefisien menggunakan uji t pada taraf derajat kepercayaan 95% sehingga jika $r \text{ hitung} > r_{\text{tabel}}$ berarti pernyataan dalam kuesioner tersebut adalah valid. Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel atau r_{tabel} nilai r_{tabel} pada $N=30$ dengan signifikansi 5% adalah 0,306.

Tabel 5.6

Uji validilitas pengawasan keuangan daerah (X1)

| Pernyataan | Koofisien korelasi | Nilai batas korelasi | keterangan |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| X.1.1 | 0,939 | 0,306 | Valid |
| X 1.2 | 0,984 | 0,306 | Valid |
| X.1.3 | 0,867 | 0,306 | Valid |
| X.1.4 | 0,939 | 0,306 | Valid |
| X.1.5 | 0,984 | 0,306 | Valid |
| X.1.6 | 0,937 | 0,306 | Valid |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| X.1.7 | 0,939 | 0,306 | Valid |
|-------|-------|-------|-------|

Sumber: *output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan tabel 5.6 diatas bahwa X1.1 sampai X1.7 mempunyai r hitung diatas 0.306 sehingga dapat di simpulkan merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variable Pengawasan Keuangan Daerah.

Tabel 5.7

Uji Validilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

| Pernyataan | Koofisien korelasi | Nilai batas korelasi | keterangan |
|------------|--------------------|----------------------|------------|
| X.2.1 | 0,970 | 0,306 | Valid |
| X.2.2 | 0,973 | 0,306 | Valid |
| X.2.3 | 0,970 | 0,306 | Valid |
| X.2.4 | 0,973 | 0,306 | Valid |
| X.2.5 | 0,973 | 0,306 | Valid |
| X.2.6 | 0,786 | 0,306 | Valid |
| X.2.7 | 0,767 | 0,306 | Valid |

Sumber: *output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan tabel 5.7 diatas bahwa X2.1 sampai X2.7 mempunyai r hitung diatas 0.306 sehingga dapat disimpulkan merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variable Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tabel 5.8
Uji validilitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

| Pernyataan | Koofisien korelasi | Nilai batas korelasi | keterangan |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Y1 | 0,959 | 0,306 | Valid |
| Y2 | 0,836 | 0,306 | Valid |
| Y3 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y4 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y5 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y6 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y7 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y8 | 0,995 | 0,306 | Valid |
| Y9 | 0,995 | 0,306 | Valid |

Sumber: *output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan tabel 5.8 diatas bahwa Y.1sampai Y.9 mempunyai r hitung diatas 0.306 sehingga dapat di simpulkan merupakan instrumen yang valid untuk mengukur variable Informasi Laporan Keuangan.

2. Uji Realibilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variable. Realiabel suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai

Cronbach's Alpha, yaitu apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari (>) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil (<) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak reliabel.

Hasil dari pengujian reliabel data variable independen dan dependen dalam penelitian ini yakni Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Informasi Laporan Keuangan dapat dilihat dalam tabel 5.9:

Tabel 5.9
Uji Reliabilitas

| Variable | Koofesien reabilitas | Nilai batas alpha | Keterangan |
|--|----------------------|-------------------|------------|
| Pengawasan keuangan daerah (X1) | 0,966 | 0,60 | Reliabel |
| Pemanfaatan teknologi dan informasi (X2) | 0,952 | 0,60 | Reliabel |
| Nilai informasi laporan keuangan (Y) | 0,986 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: *output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *alpha cronbach's* pada variable Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Laporan Keuangan dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas 0,60. Hal ini

berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variable Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi Laporan Keuangan adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variable-variabel dalam model penelitian.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel yaitu Pengawasan Keuangan Daerah (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Lihat pada table 5.10

Table 5.10

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1(Constant) | -4.391 | 1.280 | | -3.430 | .002 |
| Pengawasan Keuangan Daerah | .545 | .174 | .366 | 3.129 | .004 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | .879 | .163 | .630 | 5.379 | .000 |

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan

Sumber: *output SPSS 20.0 for windows diolah 2017*

Berdasarkan table 5.10 diatas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -4.391 + 0,545 X1 + 0,879 X2$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran pada variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi bertanda Positif. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan. Sehingga semakin meningkat pengawasan keuangan daerah dalam melakukan pengwasan atas informasi laporan keuangan akan meningkatkan nilai informasi laporan keuangan dan begitupun dengan semakin meningkat pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan informasi laporan keuangan maka akan meningkatkan nilai informasi laporan keuangan.

Dapat dijelaskan variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,545 berarti bahwa apabila pengawasan keuangan daerah naik sebesar 1%, maka nilai informasi laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 54,5% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan), variabel Pemanfaatan

Teknologi Informasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,879 berarti apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat 1%, maka nilai informasi laporan keuangan meningkat sebesar 87,9% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan), kemudian jika tidak terjadi pengawasan keuangan daerah dalam memberikan informasi laporan keuangan, tidak terjadi pemanfaatan teknologi maka nilai informasi laporan keuangan sebesar -4.391%.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian ini memperlihatkan pembuktian diterima atau ditolaknya hipotesis pada penelitian berdasarkan kriteria pengujian hipotesis.

1. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R Square (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas pengawasan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Lihat pada table 5.11

Table 5.11
Koefisien Determinasi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| | .990 ^a | .981 | .980 | .619 |

Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber :*output SPSS for windows diolah 2017*

Berdasarkan table 5.9 diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,981, R Square (R^2) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 98,1% variasi perubahan nilai informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama, sedangkan variasi perubahan yang tidak dapat dijelaskan oleh fakta – fakta lain yang tidak diamati oleh peneiti adalah sebesar 1,9% (100 – 98,1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki kontribusi yang sedang untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan.

2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi informasi memiliki kontribusi yang

sedang untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai informasi laporan keuangan.

a. Uji Simultan (uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Kriteria dalam pengujian simutan (uji F) ini adalah jika F hitung $>$ F table maka H_a diterima dan H_o ditolak begitupun sebaliknya jika F hitung $<$ F table maka H_a ditolak H_o diterima. Hasil uji F lihat pada table 5.11

Table 5.12
Uji Simultan (uji F)

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 535.031 | 2 | 267.516 | 698.863 | .000 ^a |
| | Residual | 10.335 | 27 | .383 | | |
| | Total | 545.367 | 29 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan

Sumber :*output SPSS 20.0 for windows diolah 2017*

Table 5.12 hasil uji statistic F diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 698,863 pada tingkat signifikansi 0,000. Hasil yang

diperoleh pada F table adalah sebesar 3,35. F table diperoleh pada tingkat signifikansi 0,05 dengan rumus nilai $N_1 (k-1)$ dan $N_2 (n-k) = (3 - 1=2)$ dan $(30-3=27)$ Karena F hitung $>$ F table ($698,863 > 3,35$) dan juga nilai probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($0,05 > 0,000$) maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti pada pengujian hipotesis H_1 terbukti bahwa pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

b. Uji Parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara individu berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Kriteria dalam pengujian parsial (uji t) ini adalah jika t hitung $>$ t table maka H_a diterima dan H_o ditolak begitupun sebaliknya jika t hitung $<$ t table maka H_a ditolak dan H_o diterima. Hasil uji parsial (uji t). lihat pada table 5.13

Tabel 5.13
Uji persial (t)

Coefficients^a

| odel | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| onstant) | -4.391 | 1.280 | | -3.430 | .002 |
| | .545 | .174 | .366 | 3.129 | .004 |
| | .879 | .163 | .630 | 5.379 | .000 |

Dependent Variable: Y

Sumber :*output SPSS for windows diolah 2017*

Pengujian hipotesis variabel pengawasan keuangan daerah terhadap informasi laporan keuangan dengan tingkat keyakinan 95% dengan rumus $Df = n - k = 30 - 3 = 27$ total signifikan $0,50 = 2,05$ diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,129 > 2,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian bisa dikatakan variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pengujian hipotesis variable pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan dengan tingkat keyakinan 95% diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,379 > 2,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian bisa dikatakan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap nilai informasi laporan keuangan.

E. Interpretasi Hasil Penelitian

Intrepretasi hasil ini akan menfsirkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis, apakah sesuai dengan teori dan penelitian yang ada atau sebaliknya.

1. Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan secara bersama-sama terhadap nilai laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai f hitung dan f tabel dimana f hitung sebesar 698.863 lebih besar dari f tabel 3,35 dan dari nilai signifikasi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,000 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerry Armando (2013) dan penelitian Zuliarti (2012).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah dalam hal mengawasi informasi laporan keuangan maka akan memberikan nilai yang baik untuk informasi laporan keuangan. Begitupun dengan pemanfaatan teknologi informasi semakin baik pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna memberikan

dengan cepat seua informasi mengenai keuangan daerah kepada pengguna maka akan memberikan nilai yang baik atas informasi yang diberikan.

2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan nilai t hitung dimana nilai t hitung sebesar 3,129 lebih besar dari nilai t tabel 2,05 dengan taraf signifikasinya 0,004 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,050. Hasil ini sesuai dengan penelitian Gerry Armando (2013).

Hal ini menunjukkan dikatakan bernilainya suatu informasi laporan keuangan jika pengawasan yang dilakukan sudah baik dan benar. Pengawasan ini dapat diukur dengan tercapainya sistem pengawasan yang baik serta evaluasi setiap kegiatan.

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai t hitung dan t tabel dan nilai signifikansi dan nilai probabilitas dimana nilai t hitung

sebesar 5,379 lebih besar dari 2,05 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 nilai probabilitas. Maka hasil tersebut sesuai dengan penelitian oleh Zuliatri (2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila teknologi informasi dimanfaatkan dengan baik dan benar guna untuk keperluan menginformasikan laporan keuangan dengan cepat dan dapat membantu kepada seluruh pengguna untuk mengambil suatu keputusan yang baik maka informasi laporan keuangan tersebut dapat dikatakan bernilai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada satu kerjabaperangkat daerah (SKPD) kabupaten Gowadimanahipotesis yang diajukan terbukti. Jadi, bernilai suatu informasi laporan keuangan apabila informasi tersebut mendapatkan pengawasan keuangan yang baik dan didukung dengan manfaat teknologi informasi yang diberikan.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada satu Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten Gowadimanahipotesis yang diajukan terbukti. Jadi, nilai informasi laporan keuangan akan dicapai ketika pengawasan yang dilakukan sudah baik dan benar sehingga akan mengurangi terjadinya praktek KKN dalam suatu lingkup organisasi pemerintah.

3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang diuji dengan hipotesis yang diajukan terbukti. Jadi, apabila manfaat yang diberikan dari teknologi informasi di gunakan dan dimanfaatkan dengan baik maka informasi laporan keuangan pemerintah dapat dengan cepat di berikan kepada para pengguna dan pemangku kepentingan untuk hal pengambilan keputusan sehingga informasi tersebut dapat dikatakan bernilai.

B. Saran

adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar tetap mempertahankan pengawasan dan pemanfaatan teknologi yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga informasi laporan keuangan terus mendapat nilai yang baik.
2. Agar tetap mempertahankan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga fungsi dan pengawasan akan tercipta dan jauh dari unsur KKN.
3. Agar tetap mempertahankan manfaat dan fungsi dari teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi laporan keuangan dengan cepat dan dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD Di Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Armando, Gerry. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Bukit tinggi)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- BPK beripini WTP LKPD kabupaten Gowa ,Melalui <<http://www.antarasulsel.com/berita/65566>> (tanggal akses: 11 Februari 2017).
- Celviana Widyaningrum, Rahmawati. (2010). *Pengaruh SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalandan Ketepatan waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemdasa bosukawonosraten. Symposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisitiga)*. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2001, Tentang *Tata Cara*

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik (EdisiEmpat)*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 64 Tahun 2007, Tentang *Pedoman Teknis*

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 51 Tahun 2010, *Tentang pedoman*

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 171/PMK.05/2007, Tentang *Sistem Akuntansi*

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah, Nomor 58 Tahun 2005, Tentang *Pengelolaan Keuangan*

Daerah.

Peraturan Pemerintah, Nomor 65 Tahun 2010, Tentang *Sistem Informasi Keuangan*

Daerah.

Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010, Tentang *Standar Akuntansi*

Pemerintahan..

Peraturan Presiden, Nomor 192 Tahun 2014, Tentang *Badan Pengawasan Keuangan*

dan Pembangunan.

Siswandi dan Indra Iman, (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan (edisi kedua)*.

Jakarta: Mitra Wicana Media.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Suwardjono, (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.(Edisi

Tiga). Yogyakarta: BPFE

Tanjung, Abdul Hafiz, (2013). *AKuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Tuasikal, Askam. (2007). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi*

Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Jurnal

Keuangan Perbankan. Vol. 10 Nomor 1 Hal. 66 – 82

Undang - Undang, Nomor 17 Tahun 2003, Tentang *Keuangan Negara*.

Undang - Undang, Nomor 32 Tahun 2004, Tentang *Pemerintah Daerah*.

Wilkinson, J.W, et al. (2003). *Accounting Information System: Essensial concepts*

and Applications. Fourth Edition. New York: John Wiley and Sons.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis Annisa Islamiyah Nur lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada Tanggal 23 Maret 1995 merupakan anak ke 1 dari 5 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Gazali Abd Rachman, SH dan Ibu Kasmawaty, adapun Riwayat Pendidikan Penulis menempuh Sekolah dasar di SD Inpres Tamamung II pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, Kemudian Terdaftar sebagai Siswi sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah 1 Makassar pada Tahun 2007 sampai 2010 kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Sekolah Menengah Atas di Man 2 Model Makassar kemudian Pada Tahun 2010 dan berhasil lulus pada tahun 2013 Penulis Terdaftar sebagai Mahasiswi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnia DI Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2013. Penulis Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Gowa.